



PERJANJIAN KERJASAMA
LAYANAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA
DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANJARNEGARA S PARMAN

NOMOR: W11-A5/2528/HM.01/IX/2022
NOMOR: 22/005-PKS/348

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (23/09/2022), bertempat di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H** selaku Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A** yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara dengan alamat Jl. Letjend Suprpto Banjarnegara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RAHMADIANNUR**, selaku Area Manager Purwokerto berdasarkan Surat No 01/114-KUA/DIR tanggal 1 Febuari 2021 dan berdasarkan SKPP No 2021/15896-SK/HC-BSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama- sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- [1] -

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan/**PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak didalam bidang Jasa Perbankan dengan menggunakan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengelolaan atas rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan "**PERJANJIAN**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM



Dalam **PERJANJIAN** yang dimaksud dengan :

1. **Penggugat** adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah/pemohon intervensi/ pemohon upaya hukum dalam suatu perkara.
2. **Wajib Bayar** adalah Penggugat dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL** adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran **PIHAK PERTAMA** yang antara lain namun tidak terbatas pada panjar biaya perkara secara elektronik.
4. **Transaksi** adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL.

- [2] -

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

5. **Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik** adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada **PIHAK PERTAMA** serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari **PIHAK PERTAMA** kepada Penggugat melalui layanan perbankan.
6. **Virtual Account yang selanjutnya disingkat dengan VA** merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa nomor indentifikasi Penggugat yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melekat pada RPL.
7. **Cash Management System yang selanjutnya disingkat dengan CMS** adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan/ atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara online dan realtime.
8. **Teller** adalah layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA** yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi pada pada waktu pelayanan **PIHAK KEDUA**.
9. **E-Channel** adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik **PIHAK KEDUA** yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, internet banking, dan mobile banking.
10. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. **Treasury Notional Pooling yang selanjutnya disingkat dengan TNP** adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-rekening,
12. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan SPAN** adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/ Lembaga.
13. **Java Script Object Notation yang selanjutnya disingkat dengan JSON** adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca-manusia serta merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

14. **Informasi Rahasia** adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari **PERJANJIAN** dan bukan termasuk ke dalam informasi publik
15. **Keadaan Kahar** adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan **PERJANJIAN** yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu **PIHAK** atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud **PERJANJIAN** adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tujuan **PERJANJIAN** adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara **PARA PIHAK** dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring dan pelaporan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** meliputi:



- a. Pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b. Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c. Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

- 1) **PERJANJIAN** berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **PERJANJIAN**
- 2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang **PERJANJIAN** dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran **PERJANJIAN** yang dikehendaki.

- [4] -


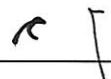
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

- 4) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri **PERJANJIAN**.
- 5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang masih ada pada saat **PERJANJIAN** berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing **PIHAK**.
- 6) Untuk maksud pengakhiran **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 - a. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
 - b. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
 - c. Mendapatkan corporate id (CID) dan unique code (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
 - d. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
 - e. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
 - f. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan realtime;
 - g. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
 - h. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 - a. Membuka RPL sesuai **PERJANJIAN** setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat;
 - b. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 - c. Mengirimkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 - d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 - e. Menginformasikan penggunaan CMS

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

PASAL 6



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a. Membuka dan mengelola RPL sesuai **PERJANJIAN**;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS.
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;
 - b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;
 - c. Menerbitkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
 - d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
 - e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - f. Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan;
 - g. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan realtime;
 - h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
 - i. Memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

PEMBUKAAN RPL

- 1) **PIHAK PERTAMA** membuka RPL pada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- 2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembukaan RPL **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
 - a. penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
 - b. setoran awal RPL minimal Rp. 0,- (nol rupiah).
- 3) **PIHAK PERTAMA** melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- 4) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik).
- 5) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk diaktifkan.

- 6) **PIHAK PERTAMA** mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PASAL 8

PENGELOLAAN RPL

- 1) **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring pada RPL termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK KEDUA** akan memberikan user ID dan password, atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaannya;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai system administrator dan administrator CMS kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Permintaan untuk perubahan user ID, password dan kebutuhan penggunaan serta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Teller dan/ atau E-channel.
- 3) Pendebitan pada RPL dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melalui layanan perbankan secara elektronik/cek/bilyet giro;
 - b. pejabat **PIHAK PERTAMA** yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional **PARA PIHAK** kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya.
- 4) Saldo minimum RPL sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- 5) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program TNP.
- 6) Biaya-biaya lainnya di luar **PERJANJIAN** akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** selama tidak bertentangan dengan **PERJANJIAN** dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.
- 7) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan saldo rekening bulan setiap akhir bulan kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA

- 1) **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan VA kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari Penggugat setelah dilakukan:
 - a. sinkronisasi teknologi informasi terkait antara **PARA PIHAK**;
 - b. pemenuhan syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan **PERJANJIAN**.
- 2) Proses unggah data VA oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme integrasi.
- 3) Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh Penggugat kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan VA melalui E-channel dan/ atau Teller.
- 4) Biaya terkait VA yaitu:
 - a. biaya E-channel dan Teller sebesar Rp 0,- (nol rupiah);
 - b. biaya transfer antarbank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- 5) **PIHAK KEDUA** mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara online dan real time.

PASAL 10

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA



- 1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat atau tanpa biaya dengan menggunakan metode SPAN.
- 2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat **PIHAK KEDUA**.
- 3) Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat **PIHAK KEDUA** menggunakan JSON Messaging terenkripsi.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- 1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan/ atau dicetak oleh **PIHAK PERTAMA** melalui layanan CMS dan/atau layanan sejenis yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan real time melalui flagging.
- 3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja berikutnya (H+1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 4) **PIHAK KEDUA** melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 5) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 12
KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.
- 2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun **PERJANJIAN** berakhir.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh **PIHAK** lainnya, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang melanggar.



PASAL 13
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- 1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **PERJANJIAN** akibat Keadaan Kahar.
- 2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- 3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.
- 4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.

- [9] -

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---	--

- 5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6) Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ditentukan dalam **PERJANJIAN**.

PASAL 15

LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan **PIHAK** lainnya.

PASAL 16

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) **PERJANJIAN** diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Perselisihan yang timbul dari **PERJANJIAN** akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum **PARA PIHAK**.

PASAL 17

KORESPONDENSI

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan **PERJANJIAN**, **PARA PIHAK** menetapkan petugas penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

MAHMAKAH AGUNG RI



Nama : Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A

Alamat : Jl. Letjend Suprpto Banjarnegara

Telepon : 0286-592810

Faksimil : 0286-591593

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

PIHAK KEDUA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA

Nama : KCP Banjarnegara S Parman

Alamat : Jl. S. Parman No. 31, Banjarnegara, Jawa Tengah

Telepon : 0286-5985994

Faksimil : 0286-5985998

e-mail : kcp407@bsm.co.id

- 2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum wajib memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungjawab **PIHAK** yang mengubah alamat.
- 4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/ atau paket menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang mengirim.

PASAL 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 19



KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN**.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan **PERJANJIAN** dan peraturan perundang- undangan serta Peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor pusat **PIHAK KEDUA**.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam **PERJANJIAN** maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali **PERJANJIAN**.




PASAL 20

KETENTUAN PENUTUP

Demikian **PERJANJIAN** ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **PERJANJIAN**, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

 <p>PIHAK PERTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H KETUA</p>	  <p>PIHAK KEDUA PT BANK SYARIAH INDONESIA RAHMADIANNUR AREA MANAGER PURWOKERTO</p>
--	---

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
